

# **BAB I**

## **PENDAHULAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dunia perekonomian pada saat ini memang menjadi tantangan berat dan perhatian utama setiap negara di dunia khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia karna mengalami permasalahan besar terkait dengan pandemi Covid-19 dan Ketenagakerjaan. Kedua masalah tersebut adalah satu kesatuan yang keduanya menciptakan dualisme permasalahan yang saling berlawanan antar satu sama lain. Dualisme tersebut akan terjadi jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan dan meminimalkan dampak yang diakibatkan dari dua permasalahan tersebut dengan baik. Namun, jika pemerintah dapat memanfaatkan kelebihan tenaga kerja yang ada maka dualisme permasalahan tidak akan terjadi bahkan memberikan dampak yang positif dalam percepatan pembangunan. Demikian pula sebaliknya jika pemerintah tidak mampu dalam memanfaatkan maka akan menciptakan dampak negatif yaitu mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Badan Pusat Statistik, awal pandemi bulan April 2020 Angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 12,36 persen atau naik 3,23 poin terhadap keadaan Tahun 2019 sebesar 9,13 persen di Kota Pontianak. Ini merupakan suatu permasalahan yang harus segera dipecahkan, meningkatnya jumlah pengangguran berdampak kepada perekonomian suatu Negara..

Dampak Covid-19 sangatlah luas, bukan hanya kesehatan dan hilangnya nyawa manusia, bahkan menyebabkan terhambatnya pemenuhan hak dari para pekerja, lemahnya roda ekonomi, meningkatnya pengangguran, PHK besar-besaran, hingga tutup dikarnakan banyaknya perusahaan mengalami kerugian yang mempengaruhi pemasukan oleh perusahaan. Oleh karna itu, pemerintah mengkatagorikan keadaan ini sebagai darurat kesehatan masyarakat.

Pemerintah menggelontorkan berbagai skema bantuan untuk membantu masyarakat pasca pandemi Covid-19. Berbagai bantuan ini diharapkan bisa meringankan beban masyarakat yang ekonominya terdampak pandemi diantaranya yaitu: berbagi sembako, bantuan sosial tunai (Bansos), BLT dana desa, Listik gratis, Subsidi gaji karyawan, BLT usaha mikro kecil hingga Program Kartu Prakerja.

Salah satu kebijakan yang memungkinkan masyarakat untuk tetap bertahan, yakni Program Kartu Prakerja. Kebijakan tersebut menjadi salah satu kebijakan yang dikeluarkan untuk mengurangi dampak pandemi itu sendiri. Progam ini dibentuk melalui Perpes Nomor 36 tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Progam Kartu Prakerja sebagaimana telah diubah dengan Pepres Nomor 76 Tahun 2020 dan didesain sebagai sebuah produk sedemikian rupa agar memberikan nilai bagi pengguna sekaligus memberikan nilai bagi Sektor Swasta.

Perubahan atas peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi kerja melalui Program Kartu Prakerja menimbang bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Kartu Prakerja sebagai bagian dari bantuan sosial untuk penanggulangan dampak pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan untuk mengembangkan serta meningkatkan tata kelola Program Kartu Prakerja, perlu mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja berlandaskan peraturan Presiden yang dibentuk Komite Cipta Kerja. Dalam hal ini, komite bertugas sebagai merumuskan dan menyusun kebijakan Program Kartu Prakerja serta melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Program Kartu Prakerja.

Program kartu prakerja adalah program pengembangan kompetensi kerja dan kewirausahaan berupa bantuan biaya atau insentif yang ditunjukkan untuk pencari kerja, pekerja yang terkena PHK, atau pekerja yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja, termasuk pelaku usaha mikro dan kecil. Penerima kartu prakerja berhak mendapatkan bantuan biaya secara daring dengan besaran tertentu untuk mendapatkan pelatihan oleh lembaga pelatihan yaitu swasta, BUMN, BUMD, atau pemerintah. Pelatihan tersebut diantaranya; pembekalan kompetensi kerja, peningkatan kompetensi kerja, alih kompetensi kerja.

Besaran insentif Kartu Prakerja Bantuan biaya program Kartu Prakerja atau sering dikenal dengan insentif terdiri dari 3 jenis, yaitu:

- Bantuan pelatihan Rp1 juta.

Peserta akan diberikan bantuan sebesar Rp. 1.000.000.- sebagai saldo membeli pelatihan yang tersedia di Mitra Pelatihan Kartu Prakerja.

- Insentif pasca pelatihan Rp. 2.400.000.- (Rp. 600.000.- x 4 bulan)

Penerima program Kartu Prakerja akan memperoleh insentif biaya mencari kerja sebesar Rp. 600.000.- selama 4 bulan.

- Insentif pasca survei Rp. 150.000.- (Rp. 50.000.- x 3 survei)

Insentif pasca survei adalah insentif pengisian survei ulasan atau evaluasi. Dana insentif ini akan diberikan sebesar Rp. 50.0000.-/survei

Dana insentif disalurkan melalui rekening bank BNI atau e-wallet seperti OVO, GoPay, DANA, dan LinkAja senilai Rp. 3.550.000.-. Adapun Rp. 2.550.000.- adalah insentif yang dapat dicairkan menjadi uang tunai setelah menjalani pelatihan dan mengisi survei sedangkan Rp. 1.000.000.- ialah biaya untuk membeli pelatihan. Insentif diberikan kepada penerima Program Kartu Prakerja yang telah menyelesaikan program pelatihan dengan tujuan untuk meringankan biaya mencari kerja, evaluasi efektivitas Program Kartu Prakerja.

Untuk mendapatkan Kartu Prakerja, calon penerima wajib mendaftarkan diri pada Program Kartu Prakerja. Pendaftaran Program Kartu Prakerja dilakukan secara daring melalui situs resmi Program Kartu Prakerja <https://www.prakerja.go.id/>. Sebelum mendaftar Kartu Prakerja, Anda harus membuat akun terlebih dahulu.

Daftar akun Kartu Prakerja bisa pakai email atau nomor ponsel yang aktif. Pendaftar wajib mengisi data atau informasi pada Situs dengan benar. Selain itu, harus menggunakan nama dan data diri sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk yang sah.

Berikut mekanisme pendaftaran Kartu Prakerja:

- Lakukan login menggunakan akun yang telah dibuat di langkah sebelumnya
- Setelah berhasil daftar akun dan login akun, masuk ke Dashboard
- Isi verifikasi KTP
- Klik Berikutnya Lengkapi data diri dan unggah foto KTP dan swafoto dengan KTP kamu
- Lakukan Verifikasi Telepon
- Klik kirim
- Setelah selesai verifikasi KTP, mengisi data diri, dan verifikasi nomor telepon, isi deklarasi survey
- Berikutnya kamu wajib melakukan tes
- Setelah selesai tes, ikuti seleksi batch

- Pilih batch yang diinginkan dan sesuaikan dengan domisili Pendaftaran selesai
- Tunggu proses evaluasi pendaftara.

Pendaftar Program Kartu Prakerja yang telah memenuhi syarat selanjutnya akan dilakukan seleksi, mulai dari data kependukan dan prioritas berdasarkan kebijakan Komite Cipta Kerja. Penerima Program Kartu Prakerja yang dinyatakan lulus seleksi akan diberikan Kartu Prakerja. Penerima diwajibkan memilih jenis pelatihan yang akan diikuti melalui Platform Digital sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh penerima Kartu Prakerja.

Program ini adalah wujud kerja sama pemerintah dan swasta dalam melayani masyarakat dengan semangat goyong-royong demi SDM unggul Indonesia maju. Untuk merspon dampak dari pandemi Covid-19, program Kartu Prakerja untuk sementara waktu akan dipriolitaskan bagi pekerja yang dirumahkan maupun pelaku usaha mikro dan kecil yang terdampak penghidupannya.

Table gambar 1.1

**Data Persebaran Penerima Kartu Prakerja Gelombang 1-11 (Bulan April-November 2020)  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020**

<b>No.</b>	<b>KABUPATEN/KOTA</b>	<b>JUMLAH PENERIMA</b>
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kota Pontianak	30.004
2.	Kota Singkawang	8.196
3.	Kab. Mempawah	7.529
4.	Kab. Sambas	7.109
5.	Kab. Bengkayang	3.182
6.	Kab. Landak	6.039
7.	Kab. Sanggau	4.047
8.	Kab. Sintang	2.242
9.	Kab. Melawi	1.636
10	Kab. Kapuas Hulu	923
11	Kab. Ketapang	5.225
12	Kab. Kubu Raya	19.254
13	Kab. Kayong Utara	2.489
14.	Kab. Sekadau	1.396
<b>TOTAL</b>		<b>99.332</b>

*Sumber : Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja, PTSP Kota Pontianak 2020*

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal Tenaga Kerja & PTSP Disdukcapil Kota Pontianak menunjukkan bahwa jumlah penerima bantuan berupa Kartu Prakerja di Kota Pontianak memiliki tingkat responden terbanyak dibandingkan Kabupaten/ Kota lain yang berada di Provinsi Kalimantan Barat.

Fenomena yang terjadi pada program Kartu Prakerja dimulai pada bulan April 2020 sebagai referensi utama publikasi ini. Bahwa masyarakat di Kota Pontianak memiliki minat yang besar terkait Kartu prakerja dan sebagian besar mereka tergolong angkatan kerja yang dirumahkan atau tidak

bekerja lagi. Hal ini terkonfirmasi oleh data dari sumber tentang banyaknya responden yang menerima program tersebut karena dampak Covid-19.

Dampak dari Covid-19 memang dapat dikatakan sedikit teratasi melalui program Kartu Prakerja. Tetapi, program tersebut menuai Pro dan Kontra yaitu berhubungan dengan nasib dan kebutuhan masyarakat kecil terutama pekerja yang terkena PHK dan mikro kecil. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa program ini tidak efektif karena tidak bisa memenuhi kebutuhan masyarakat di pasca pandemi, dimana dengan meningkatnya angka pengangguran mengakibatkan banyak pemenuhan hak seseorang yang tidak dapat dipenuhi hanya dengan diterbitkannya Kartu Prakerja.

Selain itu banyak faktor yang membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan akses program Kartu Prakerja seperti lemahnya proses seleksi, keterbatasan informasi, minat, dan lain sebagainya. Kartu Prakerja muncul sebagai salah satu program yang memberi ruang keterbukaan serta potensi untuk memicu perkembangan kreativitas bagi masyarakat kecil melalui sistem pelatihan berbasis online.

Dengan adanya fenomena di atas penulis tertarik mengkaji “Bagaimana Efektivitas Implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pontianak?”. Merujuk pada teori Riant Nugroho yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik diatarannya: Tepat Kebijakan komitmen pelaksana belum dilaksanakan dengan baik. Manajemen Pelaksana belum mampu menampung banyak keluhan dari layanan pelanggan secara bersamaan. Selain itu, sikap dari peserta yang hanya menginginkan insentif menyebabkan konflik

kepentingan diantara peserta dan lembaga pelatihan. Tepat Pelaksana oleh Kebijakan Kartu Prakerja sudah sangat memadai. sehingga kualitas pelatihan bisa terjaga dengan baik. Tepat target berkaitan dengan kelompok sasaran yang ingin dicapai menjadi faktor pendukung kebijakan. Sasaran kebijakan relatif mudah dijangkau yaitu sebesar 135 juta angkatan kerja dan sumber daya yang dialokasikan berjalan dengan baik.

Tepat Lingkungan Manajemen Pelaksana kepada mitra pelatihan dan calon peserta secara daring. Hal tersebut terlihat dari kejelasan informasi yang disampaikan melalui unggahan di sosial media Kebijakan Kartu Prakerja. Akan tetapi, komunikasi tanpa tatap muka yang dilakukan dengan mitra pelatihan, menyebabkan informasi menjadi lambat. penelitian

## **1.2 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat disimpulkan beberapa masalah yaitu sebagai berikut:

- Sasaran penerima yang di tuju tidak tepat sasaran.
- Kurangnya sosialisasi bagi penerima manfaat Program Kartu Prakerja.
- Belum adanya perbaikan/mengkaji ulang program yang diimbangi dengan kesempatan kerja

## **1.3 Fokus Penelitian**

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka perlu adanya pembatasan objek penelitian. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi kebijakan publik pada dasar hukum Perpres yaitu Pasal 4 Ayat

(1) UUD 1945, fokus penelitian ini di batasi pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja. Maka, fokus penelitian ini ingin mengetahui “Implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Pontianak.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Dari identifikasi dan fokus penelitian diatas maka dapat ditarik rumusan permasalahannya yaitu “Bagaimana Efektivitas Dinas Tenaga Kerja dalam Implementasi Program Kartu Prakerja Di Kota Pontianak”

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan luas dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses masalah implementasi dari Program Kartu Prakerja di Kota Pontianak..

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

##### **1.6.1 Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Publik khususnya bagi mahasiswa Kajian Kebijakan Publik sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini.

##### **1.6.2 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran praktis terhadap pihak-pihak yang terkait terutama bagi informan dalam upaya peningkatan efektivitas suatu kebijakan.